

361.8
SUP
P e1



LAPORAN HASIL PENELITIAN

JUDUL :

**PERANAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN
(KASUS DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN MIJEN
KOTAMADIA DATI II SEMARANG)**

OLEH :

TIM PENELITIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DIBIYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201 /XXIII/3/-/1994

TANGGAL 28 MARET 1994

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKHIR PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : Peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan (Kasus Desa Tertinggal Di Kecamatan Mijen Kotamadia Dati II Semarang)
- b. Macam Penelitian : Penunjang Pembangunan
- c. Kategori : II
2. Kepala Proyek Penelitian :
- a. Nama : Drs. G. Supradono
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Jabatan/Gol/NIP : Lektor Kepala/ IVc/ 130 354 886
- d. Universitas : Diponegoro
- e. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Sosial
3. Susunan Tim Peneliti : a. Drs. G. Supradono
b. Drs. Lanjar Kurniawan
c. Dra. Nina Widowati
d. Drs. A. Rengga
e. Dra. Maesaroh
- Anggota : 4 orang
4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mijen Kotamadia Dati II Semarang
5. Lama Penelitian : 6 bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-
7. Dibiayai melalui proyek : Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro Tahun 1994/1995

Semarang, 27 Pebruari 1995

Mengetahui
Dekan FISIP UNDIP



Warella, MPA
NIP. 130 227 811

Ketua Penelitian

Drs. G. Supradono
NIP. 130 354 886

Mengetahui :
Kepala Lembaga Penelitian
Universitas Diponegoro



Ag. Soemantri
237 480

A B S T R A K S I

Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan antara lain ditandai dengan lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta atau 60% pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan sektoral dan regional yang secara langsung dan tidak langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin ini masih cukup besar sehingga diperlukan upaya khusus untuk membantu mereka menanggulangi kemiskinannya.

Mulai Repelita VI dilancarkan program khusus, yaitu program tambahan disamping program-program pembangunan yang telah ada dan dinamakan program Inpres Desa Tertinggal. Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Melalui Inpres ini akan dipadukan program-program sektoral maupun regional yang mencakup desa-desa tersebut, sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan suatu gerakan, sehingga Kepala Desa dengan dukungan LKMD menemu-kenali penduduk miskin di daerahnya dan kemudian dengan bantuan pendamping mendorong terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kepala Desa bersama LKMD mengevaluasi usulan rencana kegiatan program IDT yang diajukan oleh KSM. Kegiatan di tingkat desa dilaksanakan melalui wadah

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditumbuhkan, dibina, diarahkan dan dikembangkan bersama dibawah koordinasi LKMD yang merupakan wadah kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan pembangunan dan didasarkan atas asas musyawarah.
2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
3. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa.

Melihat tugas LKMD tersebut ternyata bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat bahwa LKMD mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembangunan dapat diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi.

Dalam kaitannya dengan program IDT, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menghimpun usulan dari kelompok-kelompok di desa dan dibahas dalam musyawarah pembangunan desa dalam wadah LKMD. Hasil musyawarah tersebut berupa kesepakatan LKMD atas rencana kegiatan setiap kelompok yang akan dibiayai dari dana program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

A B S T R A C T

Poorness is a situation of their life and that is why this is not the desire or the will of the poor person, how ever or yet it can not be evoided with the energetic of them. We know about the mark of poorness as follows : their are the weakness or poorness of value of their production from poor, the powerness or weakness of quality of the capability of resources of human, the inferior or lowerness of the production, the limitation of invesment, of their wages and also the limitation to make participation of the development of nations.

The diminishing of the amount of the poor persons from 70 million or 60% it hapenned at 1970, it becomes 27,2 million and at 1990, this result of fact of the various program of the development sector in the regional it is directly or not directly and this is for the avoiding of the poorness. The amount of the people are still very much, so that and it is very important to help or support them from the poorness.

The beginning of the REPELITA VI it was made a special program, that is the adding program, and it is beside the true program, this was called the program of Inpress From the Leaving City (IDT). This inpress have a meaning to make a high stratified society for the poorness with followed to the poor society of the cities. Through this inpress, it will be unified with the sector program or regional program and it can covered all these cities, so that with effectiveness will be a great planning to help or to support the poorness.

The IDT or the leaving district or cities program

an activity so that the leader of the district or the LKMD with the supporting of the LKMD has make a recognising to the poor people in their environment and with their leader beside them, give for them activity to form a group of society that is called the KSM. The leader of this district with LKMD make an evaluation of proposal of planning for the activity in the district was performed through the vessel of the group of the society KSM, with are grown, and also be established, be appointed and also be developed together with LKMD and be coordinated with the LKMD, this LKMD become as a vessel for the activity the social and economic of the populations with live in poorness and this can make them lives in good property.

The organisation of the dictrict of society has a task as follows :

1. Have a plan for the developping district and it is based with discussion.
2. To make an activity and to make an increasing plan and also partisipation to the society for developping our country with unified, the best is from the goverment activity and also the unified of the society.
3. To make increasing of the condition in dinamic of the society for developping and defending the village.

As we know the ask of the LKMD it is a fact, that about the planning and the performing of the development of the village has an important and grat responsibilities. So you can see that the LKMD has a task to perform the development and it can be directed to support the poorness in our country.

With the connection the IDT program, the LKMD or the organisation of defending district has made a proposal from the district, and it was discussed in the developing of agreement in the district in the vessel of LKMD. The result of this discussion becomes an agreeing of the LKMD with the planning of the group activity, and this can be expended from the funds of the IDT.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahaesa atas terselesaikannya penelitian dengan judul : Peranan LKMD dalam upaya mengentaskan kemiskinan ".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peranan LKMD dalam upayanya mengentaskan kemiskinan khususnya di Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi masukan yang berarti bagi peningkatan peranan LKMD dalam memberikan sumbangannya untuk mengentaskan kemiskinan.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa pemberian informasi dalam pengumpulan data maupun literatur selama dalam proses penulisan laporan. Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Camat Mijen beserta Staf yang telah memberikan ijin, informasi dan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
2. Bapak Lurah Kelurahan Pesantren dan Staf yang telah membantu memberikan informasi dan ijin.
3. Bapak Lurah Kelurahan Wonoplumbon dan Staf yang telah membantu memberikan informasi dan ijin.
4. Semua warga Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Wonoplumbon yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

Selanjutnya peneliti sangat berharap semoga laporan ini berguna bagi pembaca untuk menambah cakrawala, untuk kemudian kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan laporan ini.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN

Lembar Identitas Dan Pengesahan.....	i
Abstraksi	ii
Abstraction	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tinjauan Pustaka	4
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
BAB II. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	14
A. Tinjauan Umum Daerah Penelitian	14
1. Kelurahan Pesantren	14
a. Kondisi Geografis	14
b. Pertanahan	15
c. Penduduk	15
2. Kelurahan Wonoplumbon	21
a. Kondisi Geografis	21
b. Pertanahan	21
c. Penduduk	22
B. Tinjauan Umum LKMD	29
1. Pengertian	29
2. Dasar	29
3. Tujuan	29
4. Kedudukan dan Susunan Organisasi ..	30
5. Tugas dan Fungsi Pengurus	30
6. LKMD Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Desa	35
7. LKMD sebagai Penggerak Pembangunan.	37
8. LKMD Dalam Rangka Pengawasan Pembangunan	39
9. Sumber Dana	40
10. Mekanisme Kegiatan	41
11. Administrasi	41
12. Hubungan Kerja	41
13. Pembinaan	42
C. Peranan LKMD Dalam Program IDT	43
BAB III. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

SUSUNAN PERSONALIA PENELITIAN

72

LAMPIRAN :

- Surat Ijin Penelitian
- Daftar Pertanyaan

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	16
Tabel II.2	Penduduk Menurut Umur	16
Tabel II.3	Penduduk Menurut Agama	17
Tabel II.4	Penduduk Menurut Mata Pencapaian	18
Tabel II.5	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel II.6	Penduduk Menurut Kelompok Umur	23
Tabel II.7	Penduduk Menurut Agama	24
Tabel II.8	Penduduk Menurut Mata Pencapaian	25
Tabel II.9	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan ..	26
Tabel II.10	Umur Responden	48
Tabel II.11	Status Perkawinan	49
Tabel II.12	Pendidikan Formal	50
Tabel II.13	Pekerjaan Pokok	51
Tabel II.14	Jabatan Dalam Masyarakat	52
Tabel II.15	Pernah Tidaknya Mendengar IDT	53
Tabel II.16	Sumber Informasi Tentang IDT	53
Tabel II.17	Tanggapan Masyarakat Dengan Adanya IDT	54
Tabel II.18	Dukungan Masyarakat Terhadap IDT	55
Tabel II.19	Program IDT Sesuai Dengan Upaya Masyarakat Mengentaskan Kemiskinan ...	55
Tabel II.20	Undangan Rapat Pleno LKMD/ Selapanan .	56
Tabel II.21	Usul Dalam Rapat Pleno LKMD/Selapanan	57
Tabel II.22	Dibicarakannya Upaya Mengentaskan Ke- miskinan Dalam Rapat Pleno LKMD	58
Tabel II.23	Dukungan Masyarakat Terhadap Upaya Pemerintah Mengentaskan Kemiskinan ...	59
Tabel II.24	Tindakan Yang Dilakukan Pemuka Masya- rakat Sesuai Dengan Ucapan/ Tidak	60
Tabel II.25	Sikap Masyarakat Terhadap Warga Yang Miskin	61
Tabel II.26	Anjuran Pemuka Masyarakat Dalam Mem- berantas Kemiskinan	62
Tabel II.27	Tanggapan Atas Anjuran Pemuka Masyarakat	63
Tabel II.28	Keikutsertaan Masyarakat Dalam Memahas Pengentasan Kemiskinan	64
Tabel II.29	Pernah/ Tidaknya Mendengar Tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	65
Tabel II.30	Asal Informasi Tentang KSM Yang Di dengar	66
Tabel II.31	Pengetahuan Tentang Anggota KSM	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tingkat sosial ekonomi pada umumnya negara berkembang telah mengalami kemajuan yang pesat hampir mencapai 50% dibandingkan dengan keadaan 10 - 20 tahun yang lalu. Hasil pembangunan yang telah dicapai tidak terbagi secara merata kepada seluruh penduduk, sehingga terdapat pula sebagian penduduk yang terjerat dalam perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pendapatan kelompok penduduk yang miskin ini terlalu rendah untuk mampu mendukung tingkat kehidupan manusia, kehidupan normal, kekurangan gizi, pangan dan lainnya mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi disamping banyak pula yang tidak mampu bersekolah atau tingkat buta huruf masih tinggi untuk kelompok penduduk miskin. Menanggapi pengalaman negara berkembang ini banyak ahli berkesimpulan bahwa strategi pembangunan seperti ditempuh selama ini telah gagal menjangkau secara merata kelompok penduduk yang miskin dan sebaliknya penduduk miskin ini tidak ikut serta memberi sumbangan yang berarti kepada pembangunan, sehingga kelompok hidup yang miskin ini tertinggal didalam gerak laju pembangunan yang berhasil lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok penduduk yang hidup diatas garis kemiskinan. Dan terjadilah proses pembagian hasil pembangunan yang tidak merata dan cenderung pincang.

Dikatakan berada digaris kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa dipengaruhi oleh persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan manusia oleh manusia dalam lingkungan sekitarnya.

Untuk itu perlu diberikan ciri-ciri tertentu yang melekat dalam kehidupan dibawah garis kemiskinan. Menurut Prof.Dr.Emil Salim, ciri-ciri tersebut adalah :

1. Tidak memiliki faktor produksi, seperti :
 - tanah yang cukup,
 - modal,
 - ketrampilan,
 - faktor produksi yang dimiliki sedikit sekali sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
2. Tidak memiliki kemungkinan memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha atau memperoleh modal dari perbankan karena tidak adanya jaminan kredit.
3. Tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD
4. Kebanyakan tinggal di desa, disini pendapatan tidak tetap karena lebih banyak buruh tani daripada pemilik tanah, dan kesinambungan kerja kurang terjamin karena kedudukannya sebagai pekerja bebas atau musiman. Akibat dalam keadaan penawaran kerja besar maka tingkat upah menjadi rendah.
5. Urbanisasi yang tidak disertai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, maka proses urbanisasi dinegara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga dalam perkembangan industri. Bahkan sebaliknya, terjadi perkembangan teknologi dikota-kota negara berkembang justru menampik penyerapan lebih banyak tenaga kerja (Emil Salim, 1982).

Dari ciri-ciri tersebut diatas dapat dijadikan tolok ukur didalam pengukuran keadaan sosial ekonomi/ kemiskinan dengan berbagai klasifikasi.

Dalam menanggulangi masalah kemiskinan dititik beratkan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun sebagai lembaga atau organisasi yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa atau kelurahan adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)>

B. Perumusan Masalah

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa merupakan lembaga yang berkenaan dengan pengelolaan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan. Pengertian Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa menurut Kepres No. 28 Tahun 1980 adalah : " Lembaga masyarakat di desa atau kelurahan yang timbul dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi segala aspek ideologi, ekonomi, agama, dan pertahanan keamanan." (Depdagri, 1981,3).

Disamping itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah.
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk

mengembangkan ketahanan di desa atau kelurahan.
(Depdagri, 1981, 10).

Melihat fungsi dari LKMD ternyata bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa atau kelurahan mempunyai peranan yang sangat besar. Dalam kaitannya dengan masalah kemiskinan yang terjadi di desa atau kelurahan dimana secara umum mengandung dua pengertian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang dimaksud dengan kemiskinan absolut adalah terkandung makna bahwa seseorang dianggap miskin apabila dengan pendapatan yang diperoleh, ia tidak mampu memenuhi minimum kebutuhan dasar yang diperlukan untuk memelihara fisiknya, agar bisa bekerja penuh dan menggunakan tenaganya secara efisien. Sedangkan kemiskinan relatif sangat erat kaitannya dengan masalah ketimpangan pendapatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai peranan yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena melihat fungsi dan tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yaitu merencanakan dan melaksanakan pembangunan dapat diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi. Maka dalam penelitian ini permasalahan yang ada adalah : " Bagaimana peranan LKMD dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang terjadi ?".

C. Tinjauan Pustaka

Yang dimaksud dengan kemiskinan atau golongan yang berpenghasilan rendah adalah golongan yang memperoleh pendapatan atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya. Menurut Tayar Yusuf kalangan yang masih hidup jauh di bawah normal antara lain : petani kecil di pedesaan yang hanya memiliki sedikit sekali/ tanpa memiliki tanah garapan sendiri, kaum nelayan tradisional, suku terasing, buruh kecil atau buruh kasar di kota-kota, pegawai negeri (golongan I dan II), bidang jasa lain seperti misal

tukang becak, tukang sol sepatu dan tukang tambal ban sepeda (Tayar Yusup, HIPIS III, 1979).

Selanjutnya dikemukakan bahwa bentuk-bentuk ciri kemiskinan antara lain :

1. Kekurangan nilai gizi makanan jauh dibawah normal/ bukan kurang makan.
2. Hidup yang morat-marit.
3. Kondisi kesehatan yang menyedihkan.
4. Pakaian selalu kumal tak teratur.
5. Tempat tinggal yang jauh dari memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan (sempit, pengap, kotor).
6. Keadaan anak-anak yang tak terurus/ dibiarkan bergelandangan memenuhi kebutuhan masing-masing.
7. Tidak mampu mendapatkan pendidikan formal/ non formal (ketiadaan biaya dan lemah kecerdasan).

Disamping ciri-ciri di atas menurut Prof. Emil Salim yang hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Tayar Yusuf, sehingga hal ini dapat dijadikan tolok ukur didalam mengukur kemiskinan. Di Indonesia keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya tidak jauh dari ciri-ciri tersebut.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang, perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan atau situasi miskin yang dialami seseorang atau suatu masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Kondisi individu
- b. Lingkungan alam
- c. Struktur ekonomi, dan
- d. Bencana alam. (Machmoed Zain, SH, 1993, 4-5)

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pemeratakan pendapatan, dengan melalui

delapan jalur pemerataan, yaitu :

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan,
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan,
3. Pemerataan pembagian pendapatan,
4. Pemerataan kesempatan kerja,
5. Pemerataan kesempatan berusaha,
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan wanita,
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, dan
8. Pemerataan memperoleh keadilan.

Hal tersebut di atas adalah upaya pemerintah dalam mencoba melaksanakan pemerataan pendapatan yang dengan demikian mencoba memerangi kemiskinan. Pada tingkat desa atau kelurahan usaha untuk memerangi kemiskinan tidak lepas dari peranan lembaga yang berkenaan dengan pengelolaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan, yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- Menggali dan memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
- Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. (Depdagri, 1981, 10)

Disamping itu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa

mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah.
- Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa atau kelurahan. (Depdagri, 1981, 11).

Melihat dari tugas dan fungsi LKMD, maka pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1981, memutuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan nasional dari bawah atau Bottom Up Planning, dengan mekanisme secara secara singkat sebagai berikut :

- rencana atau usulan proyek pembangunan desa disusun oleh LKMD dengan bimbingan camat dan kepala urusan pembangunan desa di kecamatan.
- kemudian dibahas oleh camat atau instansi di tingkat kecamatan melalui UDKP atau temu karya LKMD tingkat kecamatan.
- usulan dari kecamatan diteruskan pada daerah tingkat II dan dibahas Walikota/ Bupati bersama BAPPEDA dan instansi vertikal tingkat II.
- dari daerah tingkat II diteruskan pada daerah tingkat I dengan diproses yang sama, hanya didalam hal ini adalah Gubernur, BAPPEDA tingkat I dan instansi vertikal tingkat I.
- dan akhirnya kepada BAPPEDA dan DEPDAGRI c/q Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah.

Dari mekanisme diatas maka pada tingkat nasional disusunlah suatu konsep mengenai pola pembangunan pedesaan sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditetapkan, yang akhirnya akan dikembalikan lagi kepada desa atau kelurahan. Diharapkan apabila pembangunan di desa atau kelurahan berhasil maka kemiskinan akan dapat diatasi atau dikurangi.

Mulai Pelita VI dilancarkan program khusus, yaitu program tambahan di samping program-program pembangunan yang telah ada, dan dinamakan program Inpres Desa Tertinggal. Inpres ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di desa-desa miskin. Melalui Inpres ini akan dipadukan program sektoral maupun regional yang mencakup desa-desa tersebut, sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap penanggulangan kemiskinan.

Program Inpres Desa Tertinggal merupakan gerakan nasional untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai suatu gerakan, upaya penanggulangan kemiskinan akan memberi kesempatan partisipasi seluas-luasnya kepada berbagai pihak, terutama penduduk miskin itu sendiri. Kepala Desa dengan dukungan LKMD menemu kenali penduduk miskin di daerahnya dan kemudian dengan bantuan pendamping mendorong terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat. Melalui musyawarah LKMD dievaluasi usulan rencana kegiatan program IDT yang diajukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah disepakati selanjutnya disampaikan kepada Camat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Ingin mengetahui bagaimana peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Ingin mengetahui usaha-usaha atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan

bersama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk mengentaskan kemiskinan yang berkaitan dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT).

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan merencanakan pembangunan untuk evaluasi dan perbaikan yang akan datang.
2. Sebagai bahan informasi mengenai pelaksanaan Inpres Desa Tertinggal untuk mengetahui program-programnya untuk perbaikan program yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menghasilkan suatu gambaran peranan LKMD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang menunjang pengentasan kemiskinan di desa atau kelurahan Inpres Desa Tertinggal. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Mijen khususnya Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Wonoplumbon.

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang representatif, seorang peneliti harus dapat menentukan tipe penelitian apa yang harus dipergunakan. Menurut Masri Singarimbun, penelitian pada umumnya dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) tipe penelitian yaitu :

- a. Penelitian Penjajagan (eksploratif);
- b. Penelitian Penjelasan (eksplanatory);
- c. Penelitian deskriptif.

Sehubungan dengan penelitian ini, yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis dengan pertimbangan bahwa ingin diketahui terjadinya frekuensi fenomena

sosial, dimana disoroti adalah peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pengentasan kemiskinan di desa Inpres Desa Tertinggal (IDT).

2. Populasi Dan Sample

Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Atau menurut Masri Singarimbun disebutkan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya dapat diduga. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang ada di kelurahan Pesantren dan kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen Kotamadia Dati II Semarang.

Sedangkan penetapan sampel ditetapkan secara purposive yaitu peneliti telah menentukan responden dengan anggapan atau pendapatnya sendiri sebagai sampel penelitian. Dalam menentukan siapa yang termasuk anggota sampel penelitian, harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa orang atau responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Jumlah responden yang akan diambil untuk penelitian ini sebesar 75 orang terdiri dari semua pengurus LKMD, Ketua RW/RT dan tokoh-tokoh masyarakat di kedua kelurahan tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara/ interview, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian dengan mengadakan tanya jawab. Hal ini dilakukan dengan membuat interview guide yang ditujukan kepada para pejabat kelurahan yang berhak memberikan

keterangan, guna memperoleh informasi berupa keadaan desa secara umum.

- b. Daftar pertanyaan/ questionnaire, yaitu suatu usaha pengumpulan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden, dimana responden dapat mengisi atau memberikan keterangan sesuai dengan petunjuk dalam daftar pertanyaan tersebut. Yang diberi adalah semua responden yang berjumlah 75 orang terdiri dari semua pengurus LKMD, Ketua RW/ RT dan tokoh-tokoh masyarakat di kelurahan Pesantren dan kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen.
- c. Dokumentasi, yaitu suatu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada di kantor kelurahan maupun di kantor Pembangunan Desa Kotamadia Dati II Semarang yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

4. Sumber Data

Untuk menganalisa suatu masalah, data merupakan salah satu aspek yang penting untuk membantu didalam pemecahan masalah/ masukan yang sangat dibutuhkan didalam menentukan pemecahan masalah. Sumber data akan diambil dari Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen. Adapaun jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, atas dasar jawaban dari responden yang merupakan penduduk di Kelurahan Pesantren dan Kelurahan Wonoplumbon Kecamatan Mijen. Yang terdiri dari pengurus LKMD, Ketua RW/RT dan tokoh-tokoh masyarakat di kedua kelurahan tersebut.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui brosur-brosur, buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, papan monografi dan media lain yang ada di kelurahan Pesantren dan kelurahan Wonoplumbon serta kantor Bangdes Kotamadia Dati II Semarang. Bahan ini dapat digunakan untuk melengkapi penyusunan hasil penelitian.

5. Pengolahan Data dan Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini sebenarnya belum dapat memberi keterangan. Karena itu agar dapat memberikan keterangan dan dapat dipergunakan, maka data tersebut harus diolah, dianalisa dan disajikan dalam bentuk laporan. Dalam proses pengolahan data dikenal beberapa langkah yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Editing

Fungsi editing adalah memeriksa atau mengontrol data yang diperoleh untuk menjamin kemantapan atau validitas data tersebut. Adanya data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan atau minimal mendekati kenyataan akan membantu kelancaran akan langkah-langkah berikutnya.

- b. Coding

Yaitu prosedur teknis untuk mengkategorisasikan data atau mengkode, yang mempunyai tujuan untuk merubah data mentah ke dalam bentuk simbol-simbol, biasanya dalam bentuk-bentuk angka yang dapat dihitung dan dapat ditabulasikan.

- c. Tabulasi

Untuk mempermudah dan mempercepat analisa data

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka data yang masih berserakan dalam interview atau daftar, pertanyaan yang berupa hasil jawaban para responden yang telah diberi kode, dipindahkan dalam satu tabel yang sudah dipersiapkan. Di dalam pengertian tabulasi terkandung di dalamnya pengertian bagaimana cara-cara membuat tabel yang dengan mudah dapat dimengerti.

Setelah tahapan pengolahan data selesai, maka tahap berikutnya adalah tahap analisa data. Sedangkan tujuan analisa data adalah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Analisa kualitatif, yaitu suatu analisa yang digunakan untuk data yang tidak berbentuk angka-angka. Dimana analisa ini dipergunakan untuk menganalisa bagan organisasi, berbagai tugas dan dari segi dinamisnya tentang bagaimana peranan LKMD dalam mengentaskan kemiskinan pada desa tertinggal.
- b. Analisa tabel, yaitu tabel-tabel yang dibuat dalam penelitian ini diinterpretasikan masing-masing supaya tabel-tabel tersebut dapat memberikan keterangan yang berguna.